

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori *Stewardship*

Menurut Said (2015:102), *stewardship theory* merupakan teori yang dibangun berdasarkan asumsi filosofis mengenai sifat manusia yang pada hakikatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain. Teori *Stewardship* yang dikemukakan oleh Donaldson & Davis mengargumentasikan dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Teori ini berasumsi bahwa adanya hubungan kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi yang menggambarkan maksimalisasi tujuan organisasi, artinya terdapat hubungan yang kuat antara masyarakat yang dapat mewakili kepuasan dan pemerintah desa yang mewakili kesuksesan organisasi.

Stewardship theory menjelaskan bahwa kepentingan bersama dijadikan dasar dari tindakan seorang manajer. Jika terdapat perbedaan kepentingan antar *principal* dan *steward*, maka *steward* akan berusaha bekerjasama karena bertindak sesuai dengan tindakan *principal* dan demi kepentingan bersama dapat menjadi tindakan yang rasional agar tercapainya tujuan bersama.

Implikasi teori *stewardship* terhadap penelitian ini yaitu dapat menjelaskan eksistensi pemerintah desa sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya serta bertindak sesuai dengan kepentingan publik dengan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat untuk kesejahteraan masyarakat (*principal*). Pertimbangan penggunaan *Stewardship Theory* dalam penelitian ini adalah hubungan yang terjadi antara Pemerintah Desa dan masyarakat, dimana Pemerintah Desa sebagai pelayan publik (*steward*) termotivasi oleh kepentingan bersama dan merasa memiliki kewajiban untuk menunjukkan akuntabilitas kepada masyarakat sebagai (*principal*) dalam hal pengelolaan dana desa sehingga tujuan utama dari pengimplementasian

dana desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sehingga apa yang ditargetkan dapat tercapai.

2.1.2 Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa

Menurut Mada, dkk (2017:108), kompetensi merupakan faktor yang dapat mempengaruhi akuntabilitas, untuk meningkatkan akuntabilitas diperlukan adanya kompetensi. Menurut Edison, dkk (2017:140), kompetensi adalah karakteristik yang mendasari seseorang yang menghasilkan pekerjaan yang efektif dan kinerja yang unggul. Pada dasarnya setiap karyawan mempunyai ciri atau memiliki karakter berdasarkan kemampuan yang harus di kuasainya. Menurut Wibowo (2016:271) , kompetensi adalah kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan dan tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Menurut Apriana *et al.*,(2020:95) menjelaskan bahwa :

kompetensi adalah kombinasi pengetahuan, keahlian, dan keterampilan yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan pada fungsi atau tugas yang digunakan. Sehingga dapat diartikan bahwa kompetensi adalah karakteristik yang didasari oleh kemampuan, keterampilan serta pengetahuan untuk menghasilkan pekerjaan yang efektif dan kinerja yang unggul.

Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa kompetensi pemerintahan antara lain mencakup pengetahuan, sikap dan keterampilan yang terkait dengan kebijakan desentralisasi, hubungan pemerintah pusat dengan daerah, pemerintahan umum, pengelolaan keuangan daerah. Aspek tersebut sejalan dengan Hutapea (2011:28) yang mengungkapkan bahwa ada tiga komponen utama pembentukan kompetensi yaitu pengetahuan yang dimiliki seseorang, kemampuan, dan perilaku individu. Sedangkan menurut Wibowo (2013:118), bahwa ada tiga hal aspek kompetensi, diantaranya :

1. Sifat-sifat Pribadi (*Personal attributes*)
Merupakan karakteristik dan kualitas seseorang yang dibawa ketempat kerja, seperti kejujuran, empati, stamina, dan lain-lain.
2. Keterampilan (*Skills*)
Keterampilan kerja yang dibutuhkan dalam bidang tugas masing-masing, seperti mengoperasikan mesin, kejelasan dan keberanian dalam menulis, memaparkan, memeriksa kendaraan dan lain-lain.
3. Pengetahuan (*Knowledge*)

Dibutuhkan seseorang untuk menerapkan atribut/sifat dan keterampilannya secara efektif, seperti latar belakang kebijaksanaan, pemahaman konteks, persyaratan yang sah, tujuan bisnis dan lain-lain.

Menurut Kompri (2017:173), dengan mengidentifikasi karakteristik pengetahuan dan keterampilan individu yang diperlukan ditempat kerja memungkinkan tugas dan tanggung jawab akan dilakukan secara efektif. Dengan demikian standar kualitas professional akan dapat dicapai. Menurut Tagala (2018), kompetensi suatu karakteristik yang mendasari pembawaan seorang individu yang dihubungkan dengan kriteria yang direferensikan terhadap kinerja yang unggul atau efektif dalam sebuah pekerjaan atau situasi. Menurut Sutrisno (2016:206), terdapat lima karakteristik kompetensi, yaitu :

1. *Motif (Motive)*
Karakteristik motif merupakan gambaran pegawai tentang sesuatu yang dipikirkan atau yang diinginkan, dan merupakan dorongan untuk melakukan tindakan guna memenuhi keinginannya.
2. *Sifat (Traits)*
Sifat merupakan karakteristik mental pegawai dan konsistensi respons terhadap rangsangan, tekanan, situasi, dan informasi. Sifat ini menentukan tingkat emosi pegawai dalam merespon rangsangan dan informasi
3. *Konsep Diri (Self-Concept)*
Karakteristik konsep diri merupakan gambaran pegawai tentang sikap, nilai-nilai, dan bayangan diri terhadap pekerjaan, tugas atau jabatan yang dihadapinya untuk dapat diwujudkan melalui kerja dan usahanya
4. *Pengetahuan (Knowledge)*
Karakteristik pengetahuan merupakan kemampuan pegawai yang terbentuk dari informasi yang diterimanya. Pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang memprediksi apa yang dapat mereka lakukan, bukan apa yang akan mereka lakukan.
5. *Keterampilan (Skills)*
Kemampuan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu baik secara fisik maupun mental. Kompetensi keterampilan mental atau kognitif meliputi, pemikiran analitis (memproses pengetahuan atau data, menentukan sebab dan pengaruh mengorganisasi data dan rencana) dan pemikiran konseptual.

2.1.3 Komitmen Organisasi Pemerintah Desa

Menurut Suherwan dan Kamaliah (2018), komitmen organisasi adalah orientasi individu terhadap kerja yang menunjukkan bahwa individu selalu memikirkan pekerjaan, dimana pekerjaan ini memberikan kepuasan hidup dan status bagi kehidupan di pemerintahan desa. Menurut Suyana (2013), komitmen

organisasi sebagai suatu ikatan psikologis karyawan pada organisasi yang ditandai dengan adanya kepercayaan dan penerimaan yang kuat atas tujuan dan nilai-nilai organisasi, kemauan untuk mengusahakan tercapainya kepentingan organisasi dan keinginan yang kuat untuk mempertahankan kedudukan sebagai anggota organisasi. Menurut Mardiana, dkk (2018), komitmen organisasi merupakan salah satu topik yang akan selalu menjadi tinjauan baik bagi pihak manajemen dalam sebuah organisasi maupun bagi para peneliti yang khususnya berfokus pada perilaku manusia. Komitmen organisasi menjadi penting khususnya bagi organisasi yang ada saat ini dikarenakan dengan melihat sejauh mana keberpihakan seorang karyawan terhadap organisasi, dan sejauh mana karyawan tersebut berniat untuk memelihara keanggotaannya dengan organisasi maka dapat diukur pula sebaik apa komitmen seorang karyawan terhadap organisasinya. Menurut Wibowo (2017), komitmen organisasi sering didefinisikan sebagai sebuah keinginan kuat untuk tetap menjadi anggota organisasi tertentu, keinginan untuk mendesak usaha pada tingkat tinggi atas nama organisasi, keyakinan yang pasti dalam dan penerimaan atas nilai-nilai dan tujuan organisasi. Dengan kata lain, komitmen adalah suatu sikap yang mencerminkan loyalitas pekerja pada organisasi dan merupakan suatu proses yang sedang berjalan melalui mana peserta organisasi menyatakan perhatian mereka terhadap organisasi dan kelanjutan keberhasilan dan kesejahteraan.

Sebuah komitmen didalam organisasi akan tercapai apabila terdapat individu yang memiliki rasa kepeduliannya terhadap sebuah organisasi. Sejalan dengan Christina, dkk (2012), komitmen dapat tercapai apabila individu dalam organisasi sadar akan hak dan kewajibannya dalam organisasi tanpa melihat jabatan dan kedudukan masing-masing individu, karena pencapaian tujuan organisasi merupakan hasil kerja semua anggota organisasi yang bersifat kolektif.

Menurut Mardiana, dkk (2018), terdapat tiga dimensi komitmen organisasi yaitu :

1. Komitmen Afektif (*Affective Commitment*)
Komitmen afektif mengarah pada *the employee's emotional attachment to, identification with, and involvement in the organization*. Artinya, komitmen afektif berkaitan dengan keterikatan emosional karyawan, identifikasi karyawan pada, dan keterlibatan karyawan pada organisasi. Dengan demikian, karyawan yang memiliki komitmen afektif yang kuat akan terus

bekerja dalam organisasi karena mereka memang ingin melakukan hal tersebut.

2. **Komitmen Kontinuans (*Continuance Commitment*)**

Komitmen kontinuans berkaitan dengan *an awareness of the costs associated with leaving the organization*. Artinya, komitmen kontinuans berkaitan dengan persepsi seseorang atas biaya dan resiko dengan meninggalkan organisasi saat ini. Melibatkan pengorbana pribadi apabila meninggalkan organisasi dan ketiadaan alternatif yang tersedia bagi orang tersebut. Hal ini menunjukkan adanya pertimbangan untung rugi dalam diri karyawan berkaitan dengan untuk tetap bekerja atau justru meninggalkan organisasi.

3. **Komitmen Normatif (*Normative Commitment*)**

Komitmen normatif merefleksikan *a feeling of obligation to continue employment*. Komitmen normatif merupakan sebuah dimensi moral yang didasarkan pada perasaan wajib dan tanggungjawab pada organisasi yang mempekerjakannya. Dengan kata lain, komitmen normatif berkaitan dengan perasaan wajib untuk tetap bekerja dalam organisasi. Karyawan yang memiliki komitmen normatif tinggi merasa bahwa mereka wajib bertahan dalam organisasi.

2.1.4 Partisipasi Masyarakat

Menurut Matani dan Linda (2020:25), partisipasi merupakan suatu konsep dalam pengembangan masyarakat. Partisipasi masyarakat merupakan bentuk keikutsertaan dan keterlibatan secara aktif dalam proses pembangunan dan menikmati manfaat pembangunan yang sesuai dengan kebutuhannya. Menurut Dewi, dkk (2013) menjelaskan bahwa :

Partisipasi masyarakat merupakan suatu hak yang dimiliki masyarakat untuk ikut andil dalam pengambilan keputusan di dalam tahapan proses pembangunan, mulai dari awal perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun spelestarian lingkungan. Disini masyarakat tidak hanya sebagai penerima fasilitas maupun manfaat tetapi sebagai subjek pembangunan yang berkesinambungan.

Menurut Dwiningrum (2015:58-59), partisipasi masyarakat ditinjau dari bentuknya dibedakan menjadi dua bagian, yaitu:

1. Partisipasi secara fisik. Dimana partisipasi ini merupakan partisipasi yang dilakukan dalam bentuk menyelenggarakan sebuah pendidikan maupun usaha-usaha. Seperti usaha sekolah, membuat beasiswa, dan juga membantu pemerintah dengan cara membangun gedung untuk masyarakat atau dapat juga bentuk bantuan yang lain.
2. Partisipasi secara non fisik. Merupakan partisipasi yang melibatkan masyarakat dalam menentukan tujuannya. Seperti dimana harus menempuh

pendidikan nasional dan juga meratanya wawasan maupun keinginan masyarakat untuk menuntut ilmu dengan cara melalui pendidikan. Sehingga pemerintah tidak kesulitan dalam memberikan arahan kepada masyarakat untuk bersekolah.

Menurut Abu (2011:116), ada beberapa bentuk partisipasi masyarakat yaitu, partisipasi dalam bentuk pikiran, dalam bentuk tenaga, dalam bentuk harta maupun benda, dalam bentuk keahlian atau ketrampilan, dalam bentuk sosial. Menurut Ibori (2013:4), partisipasi masyarakat terbagi ke dalam beberapa bentuk, yaitu :

- a. Partisipasi dalam bentuk pikiran, ide atau gagasan.
- b. Partisipasi dalam bentuk tenaga
- c. Partisipasi dalam bentuk pikiran dan juga tenaga
- d. Partisipasi dalam bentuk keahlian
- e. Partisipasi dalam bentuk barang
- f. Partisipasi dalam bentuk uang

Berdasarkan pernyataan tersebut bahwa Partisipasi Masyarakat disimpulkan menjadi Partisipasi Non Fisik yaitu dalam bentuk pikiran, ide atau gagasan dan Keahlian. Sedangkan Partisipasi Fisik yaitu dalam bentuk uang dan barang.

Menurut Mahayani, dkk (2017), terdapat beberapa alasan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemerintahan desa, yaitu :

1. Partisipasi Masyarakat merupakan alat untuk memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat .
2. Masyarakat akan lebih mempercayai program kegiatan pembangunan apabila mereka dilibatkan dalam persiapan dan perencanaannya
3. Mendorong partisipasi umum

Menurut Kali (2011), bahwa ada tiga dimensi untuk mewujudkan partisipasi masyarakat yaitu:

- a. Partisipasi dalam tahap perencanaan
- b. Partisipasi dalam tahap pelaksanaan
- c. Partisipasi dalam tahap implementasi tindakan

2.1.5 Akuntabilitas

Menurut Nurlinda (2018), akuntabilitas adalah suatu kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau

pertanggungjawaban. Menurut Mada, dkk (2017), akuntabilitas merupakan kewajiban yang dimiliki oleh individu yang diamanati mengelola sumber daya dengan cara mempertanggung-jawabkan dan menerangkan kinerja individu, badan hukum, maupun pemimpin kepada yang memiliki hak untuk menerima pertanggungjawaban dan keterangan. Berdasarkan PP No.71 Tahun 2010, akuntabilitas adalah tindakan pertanggungjawaban untuk mencapai tujuan secara berskala pada pelaksanaan kebijaksanaan pengelolaan potensi sumber daya yang dipercayakan pada suatu suatu organisasi.

Menurut Mahmudi (2015:9), akuntabilitas pada dasarnya terbagi menjadi dua yaitu:

1. Akuntabilitas Vertikal (*Vertical Accountability*) Akuntabilitas Vertikal adalah akuntabilitas kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya akuntabilitas kepala dinas kepada bupati atau walikota, menteri kepada presiden, kepala unit kepada kepala cabang, kepala cabang kepada CEO, dan lain sebagainya.
2. Akuntabilitas Horizontal (*Horizontal Accountability*) Akuntabilitas Horizontal adalah akuntabilitas kepada publik secara luas atau terhadap sesama lembaga lainnya yang tidak memiliki hubungan atasan bawahan.

Menurut Mahmudi (2013:9), adapun dimensi akuntabilitas adalah sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran (*Accountability For Probity and Legality*) Akuntabilitas hukum dan kejujuran adalah akuntabilitas lembaga-lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan mentaati ketentuan hukum yang berlaku. Penggunaan dana publik harus dilakukan secara benar dan telah mendapatkan otorisasi.
2. Akuntabilitas Manajerial (*Managerial Accountability*) Akuntabilitas manajerial adalah pertanggungjawaban lembaga publik untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien. Akuntabilitas dapat juga diartikan sebagai akuntabilitas kinerja (*performance accountability*). Inefisiensi organisasi publik adalah menjadi tanggung jawab lembaga yang bersangkutan dan tidak boleh dibebankan kepada klien atau customer-nya.
3. Akuntabilitas Program (*Program Accountability*) Akuntabilitas program berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah organisasi telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. Lembaga-lembaga publik harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program. Dengan kata lain akuntabilitas program berarti bahwa

program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu yang mendukung strategi dan pencapaian misi, visi, dan tujuan organisasi.

4. Akuntabilitas Kebijakan (*Policy Accountability*)

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang diambil. Lembaga-lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak masa depan. Dalam membuat kebijakan harus dipertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu diambil, siapa sasarannya, pemangku kepentingan (*stakeholders*) mana yang akan terpengaruh dan memperoleh manfaat dan dampak (negatif) atas kebijakan tersebut.

5. Akuntabilitas Finansial (*Financial Accountability*)

Akuntabilitas finansial adalah pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan uang publik (*money public*) secara ekonomi, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi. Akuntabilitas finansial menekankan pada ukuran anggaran dan finansial. Akuntabilitas finansial sangat penting karena pengelolaan keuangan publik akan menjadi perhatian utama publik.

2.1.6 Pengelolaan Dana Desa

Undang-Undang No.6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adanya asas otonomi daerah pada desa menjadikan desa memiliki kewenangan dalam mengatur serta mengelola urusan pemerintahannya termasuk pengelolaan dana desa.

Dana desa merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN yang diprioritaskan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa. Pengelolaan Dana Desa dilaksanakan berdasarkan asas-asas yang terdapat dalam Permendagri No.20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

1. **Transparan**
transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Sejalan dengan Ratminto dalam Anggraini (2013: 205), menyatakan bahwa Transparansi yaitu terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan secara memadai dan mudah dimengerti. Sehingga masyarakat secara mudah bertanya mengenai hasil kegiatan ataupun pengelolaan keuangan. Asas transparan menjamin hak semua pihak untuk mengetahui seluruh proses dalam setiap tahapan serta menjamin akses semua pihak terhadap informasi terkait Pengelolaan Keuangan Desa. Dengan demikian, Pemerintah Desa pro aktif dan memberikan kemudahan bagi siapapun, kapan saja untuk mengakses /mendapatkan/ mengetahui informasi terkait Pengelolaan Keuangan Desa.
2. **Akuntabel**
Asas ini menuntut Kepala Desa mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan APBDesa secara tertib, kepada masyarakat maupun kepada jajaran pemerintahan di atasnya, sesuai peraturan perundang-undangan.
3. **Partisipatif**
Partisipatif atau Partisipasi adalah pengambilan atau bagian pengikutsertaan suatu kegiatan. Partisipasi sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (*button-up*) dengan mengikutserakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya.
4. **Tertib dan Disiplin Anggaran**
Yang diartikan bahwa anggaran harus dilaksanakan secara konsisten dengan pencatatan atas penggunaannya sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan di desa. Hal ini dimaksudkan bahwa pengelolaan keuangan desa harus sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu tentang Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dirangkum dalam tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Variabel	Teknis Analisis Data	Hasil Penelitian
1	Anam Masruhin dan M. Elfan Kaukab (<i>Journal of Economic, Business and Engineering Vol. 1, No. 1, Oktober 2019</i>)	Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Partisipasi Masyarakat, dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Perangkat Desa di Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo)	Variabel X : Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Partisipasi Masyarakat dan Kejelasan Sasaran Anggaran Variabel Y: Pengelolaan Dana Desa	Statistik Deskriptif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi Aparatur Berpengaruh Positif Terhadap Pengelolaan Dana Desa 2. Komitmen Organisasi berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa 3. Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa 4. Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa
2	Zulkifli, Sulaiman, Riza Wahyudi dan Rita Martini (<i>Seminar Nasional Terapan Riset Inovatif (SENTRINOV) Ke-6 Vol. 6 No. 2 ,2020</i>)	Peran Kompetensi, Komitmen, dan Partisipasi Masyarakat Bagi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa	Variabel X : kompetensi aparatur desa, Komitmen Organisasi dan Partisipasi Masyarakat Variabel Y: Akuntabilitas Pengelolaan	Regresi Berganda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi aparatur desa berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa 2. Komitmen organisasi berpengaruh

			Keuangan Dana Desa		<p>signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa</p> <p>3. Partisipasi masyarakat desa berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa</p>
3	Cornelia Desiana Matani dan Linda Hutajulu (<i>Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah, Vol.5 No.3 Des 2020</i>)	Pengaruh Kompetensi, Komitmen Organisasi, Partisipasi Masyarakat, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kampung Dikota Jayapura	<p>Variabel X : Kompetensi Aparatur Desa, Komitmen Organisasi, Partisipasi Masyarakat dan Sistem Pengendalian Internal</p> <p>Variabel Y : Akuntabilitas Pengelolaan Dana</p>	Regresi Berganda	<p>1. Kompetensi aparatur desa memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa</p> <p>2. Komitmen organisasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa</p> <p>3. Partisipasi masyarakat memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas</p>

					<p>Pengelolaan Dana Desa</p> <p>4. Sistem pengendalian internal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa</p>
4	Dwi Fitri Puspa dan Riky Agung Prasetyo (<i>Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi. Vol. 20 No. 2 September 2020 : 281-298</i>)	Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Sistem Pengendalian Internal, dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	<p>Variabel X : Kompetensi Pemerintah Desa, Sistem Pengendalian Internal, dan Aksesibilitas Laporan Keuangan</p> <p>Variabel Y : Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa</p>	Statistik Deskriptif	<p>1. Kompetensi pemerintah desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa</p> <p>2. Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa</p> <p>3. Aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa</p>
5	Yasmi Nurdin dan Irwan Wijaya (<i>Accounting,</i>	Pengaruh Kompetensi Akuntansi	Variabel X : Kompetensi Akuntansi	Statistik Deskriptif	1. Kompetensi akuntansi aparat

	<i>Accountability, and Organization System (AAOS) Journal, September 11 2019 ,Vol. 1 No.1)</i>	Aparat Pengelola Dana Desa dan Komitmen Organisasi Pemerintah Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Aparat Pengelola Dana Desa dan Komitmen Organisasi Pemerintah Desa Variabel Y : Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa		pengelola dana desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa 2. Komitmen organisasi pemerintah desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa
6	Sarifudin Mada, Lintje Kalangi, dan Hendrik Gamaliel (<i>Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "Goodwill" ,Vol.8 No.2 , 2017)</i>	Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo	Variabel X : Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Variabel Y : Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Statistik Deskriptif	1. kompetensi aparat pengelola dana desa berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa 2. Komitmen organisasi pemerintah desa berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa 3. Partisipasi masyarakat berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap akuntabilitas

					pengelolaan dana desa
7	Khaeril Wahyu Perdana (<i>Jurnal Universitas Muhamadiyah Yogyakarta, 2018</i>)	Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bantul	Variabel X : Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Variabel Y : Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Statistik Deskriptif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa 2. Komitmen Organisasi Pemerintah Desa tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa 3. Partisipasi Masyarakat Berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa 4. Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
8	Baiq Mira Luthfiani dan Thatok Asmony (<i>E-jurnal Akuntansi Vol 30</i>)	Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas	Variabel X : Kompetensi Perangkat Desa, Aplikasi Siskeudes,	Regresi berganda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi perangkat desa tidak berpengaruh secara signifikan

	<i>No 7 Juli 2020 Hlmn. 1886-1899)</i>	Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Lombok Tengah	Kepatuhan Pajak Bendahara-wan Desa dan Partisipasi Masyarakat. Variabel Y : Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa		terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa 2. Aplikasi Siskeudes berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa 3. Kepatuhan Pajak Bendahara-wan Desa memiliki berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. 4. Partisipasi masyarakat tidak berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa
9	Periansya dan Sopiyan AR <i>(Jurnal Riset Terapan Akuntansi , Vol 4 No.1 ,2020)</i>	Dampak Kompetensi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Kecamatan Rambutan Banyuasin	Variabel X : Kompetensi Aparatur Desa dan Partisipasi Masyarakat . Variabel Y :	Regresi berganda	1. Kompetensi Aparatur Desa memiliki hubungan atau berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan keuangan dana desa

			Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa		2. Partisipasi Masyarakat Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan keuangan dana desa
10	Ni Komang Ayu Julia Praba Dewi dan Gayatri (<i>E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.26.2.Februari 2019</i>)	Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	<p>Variabel X : Kompetensi perangkat desa, Ke-pemimpinan kepala desa dan Partisipasi Masyarakat</p> <p>Variabel Y : Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa</p>	Regresi Berganda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi perangkat desa memiliki pengaruh positif pada akuntabilitas pengelolaan dana desa 2. kepemimpinan kepala desa memiliki pengaruh positif pada akuntabilitas pengelolaan dana desa 3. Partisipasi masyarakat memiliki pengaruh positif pada akuntabilitas pengelolaan dana desa

Sumber : Data diolah penulis 2021

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran merupakan peranan yang sangat penting dalam memahami secara tepat terhadap objek yang akan diteliti. Kerangka berfikir ini menjadi penjelasan sementara terhadap fenomena-fenomena yang menjadi objek permasalahan yang dianalisis secara kritis dan sistematis sehingga menghasilkan hubungan antar variabel yang diteliti untuk merumuskan hipotesis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada Desa di Kecamatan Kayuagung.

2.3.1 Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Dengan adanya Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa kompetensi pemerintahan antara lain mencakup pengetahuan, sikap dan keterampilan. Dengan adanya individu produktif yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik itu di dalam institusi maupun perusahaan yang memiliki fungsi sebagai aset sehingga harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya demi tercapainya sumber daya manusia yang baik. Apriana, *et al.*, (2020) berpendapat bahwa kompetensi sumber daya manusia merupakan kemampuan melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan dengan standar pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang sesuai. Artinya, sumber daya manusia yang berkompeten akan dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan.

Perangkat desa yang memiliki kapasitas memadai akan menentukan keberhasilan jalannya suatu organisasi desa. Pemerintah desa sebagai pelayan publik (*Steward*) dituntut untuk meningkatkan akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa. Apabila kinerja pemerintah ditingkatkan maka akan menghasilkan *output* yang baik pula. Sejalan dengan teori *stewardship*, aparat yang memiliki fungsi sebagai pelayan publik berkewajiban untuk melayani kepada masyarakat sebagai wujud akuntabilitas. Sehingga pada saat mengelola dana desa akan mengenai sasaran yang tepat dalam penggunaan dana desa guna memberikan pelayanan yang terbaik sesuai dengan cita-cita yang diharapkan.

Hal ini pula sejalan dengan penelitian yang dilakukan Matani dan Linda (2020) bahwa Kompetensi Aparat Desa berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Artinya semakin baik peranan aparat pemerintah desa maka, akuntabilitas terhadap dana desa yang baik dapat terwujud.

H1: Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa berpengaruh secara parsial terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada Desa di Kecamatan Kayuagung.

2.3.2 Pengaruh Komitmen Organisasi Pemerintah Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Menurut Wibowo (2017) menjelaskan bahwa :

Komitmen organisasi sering didefinisikan sebagai sebuah keinginan kuat untuk tetap menjadi anggota organisasi tertentu, keinginan untuk mendesak usaha pada tingkat tinggi atas nama organisasi, keyakinan yang pasti dalam dan penerimaan atas nilai-nilai dan tujuan organisasi. Dengan kata lain, komitmen adalah suatu sikap yang mencerminkan loyalitas pekerja pada organisasi dan merupakan suatu proses yang sedang berjalan melalui mana peserta organisasi menyatakan perhatian mereka terhadap organisasi dan kelanjutan keberhasilan dan kesejahteraan.

Menurut Suherwan dan Kamaliah (2018) menjelaskan bahwa:

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan yang akuntabel dan transparan adalah komitmen aparatur karena inti dari komitmen dari suatu pemerintah tercermin dalam keterikatan dan loyalitas seorang pegawai kepada organisasinya yang akan mendorong mereka untuk selalu bekerja dalam berbagai situasi.

Dalam pengelolaan keuangan desa dibutuhkannya sebuah komitmen agar terciptanya tujuan utama dalam sebuah organisasi. Teori *stewardship* juga menjelaskan bahwa kepentingan bersama dijadikan dasar dari tindakan seorang manajer. Aparat pengelola dana desa harus memiliki komitmen yang tinggi terhadap organisasi untuk memenuhi kewajibannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Suyana (2013) menjelaskan bahwa :

komitmen organisasional menunjukkan suatu daya tarik dari seseorang dalam mengidentifikasi keterlibatannya dalam suatu bagian organisasi. Komitmen organisasional dibangun atas dasar kepercayaan pekerja atas nilai-nilai organisasi, kerelaan pekerja membantu mewujudkan tujuan organisasi dan loyalitas untuk tetap menjadi anggota organisasi.

Akuntabilitas pengelolaan dana desa akan terwujud dengan komitmen organisasi pemerintah desa yang baik, dikarenakan aparatur yang terdapat didalam organisasi atau institusi memiliki rasa keterlibatan dan kepuasan hidup dalam bekerja untuk mencapai tujuan organisasi. Menurut Perdana (2018), Penyelarasan tujuan organisasi dan aparatur dapat terwujud dengan komitmen organisasi yang tinggi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Masruhin dan Elfan (2019) bahwa Komitmen Organisasi berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Artinya, semakin baik Komitmen Organisasi Pemerintah Desa maka semakin baik Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

H1: Komitmen Organisasi Pemerintah Desa berpengaruh secara parsial Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada Desa di Kecamatan Kayuagung.

2.3.3 Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Menurut Dewi, dkk (2013) menjelaskan bahwa :

Partisipasi masyarakat merupakan suatu hak yang dimiliki masyarakat untuk ikut andil dalam pengambilan keputusan di dalam tahapan proses pembangunan, mulai dari awal perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun spelestarian lingkungan. Disini masyarakat tidak hanya sebagai penerima fasilitas maupun manfaat tetapi sebagai subjek pembangunan yang berkesinambungan. Keikutsertaan masyarakat ini akan dapat mengoptimalkan pengelolaan dana desa sebab prioritas penggunaan dana desa salah satunya adalah pemberdayaan masyarakat.

Menurut Abid (2018), menjelaskan bahwa :

Pemberdayaan masyarakat hanya mampu tercapai apabila masyarakat turut berpartisipasi aktif dalam kegiatan desa. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari program pembangunan maupun pengembangan masyarakat pedesaan.

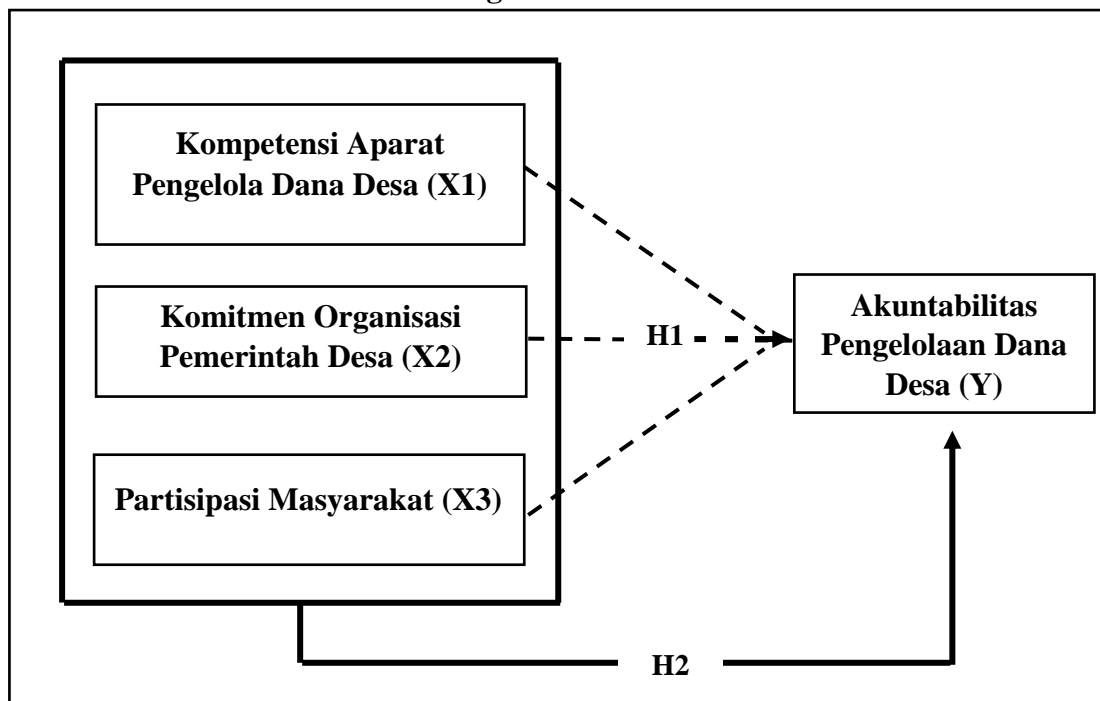
Keterlibatan partisipasi masyarakat apabila dihubungkan dengan teori *stewardship* dalam pengelolaan anggaran desa sangat penting karena dengan adanya partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan akan membantu anggota dewan legislatif dalam menyusun serta mengelola anggaran desa. Hasil penelitian yang dilakukan Nurdin dan Irwan (2019) menunjukkan Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Artinya semakin baik tingkat Partisipasi Masyarakat maka semakin baik Akuntabilitas Pengelolaan dana desa.

H1: Partisipasi Masyarakat berpengaruh secara parsial terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada Desa di Kecamatan Kayuagung.

Berdasarkan tinjauan pustaka tersebut maka, kerangka konseptual digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Sumber : *Penulis 2021*

Keterangan :

--- : Parsial

→ : Simultan

2.4 Pengembangan Hipotesis

Menurut Sugiyono (2018:63), hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

- H1 : Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa dan Partisipasi Masyarakat berpengaruh secara parsial terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada Desa di Kecamatan Kayuagung.
- H2 : Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa dan Partisipasi Masyarakat berpengaruh secara simultan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada Desa di Kecamatan Kayuagung.